

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang

Universitas Negeri Medan
dewisarahsimbolon@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indikator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. Macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.

Kata Kunci: Pembangunan, Pemerintah Desa

Abstract

This research generally aims at knowing the real picture of how the role of village government in development. The role is an indicator early success or failure of a village head and village officials carry out its duties. In this study, researchers used techniques observation, interview, and documentation. Based on the results of research on the role of village government in development can be concluded that the community has a bad role because the village apparatus is not optimizing it that role. The stalling of a village development is caused by the village government has not been able to improve the standard of living of the community. This is influenced by the existence lack of coordination between the government and other village officials, lack of assertiveness in carrying out its functions as village government or village head.

Keywords: Development, Village Government

PENDAHULUAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan

desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:76). Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini Menggunakan Jenis/Pendekatan Yang berupa Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan Merupakan Studi yang digunakan dalam Mengumpulkan Informasi dan data dengan bantuan berbagai macam Material yang ada dipergustakaan seperti dokumen, buku, artikel. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Nurgiansah, 2021).

Untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Yakni, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Upaya mengumpulkan informasi dimaksud dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Hasil Penelitian**

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Maschab (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:14) pengertian sosiologis, Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan kehidupannya relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002:854) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga memberikan arti

peranan, “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Sedangkan menurut Pariata Westa dalam Tuti (2003:9) mengatakan peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat secara partisipatif. Masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari segi sumber sosial-budaya. Masyarakat memiliki “kekuatan” yang bila digali atau disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mampu memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencanarencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dengan perkataan lain, gerakan pemberdayaan dalam pembangunan “dari, oleh dan untuk” masyarakat (Harry Hikmat, 2010:217-218).

Pandangan pembangunan menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto (1993: 8), menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi lain, yang dipandang lebih baik. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro, 2000:21).

Pembangunan dapat diartikan oleh

masing-masing pakar berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada intinya pembangunan merupakan proses menuju pada perubahan. Beberapa pakar mendefinisikan pembangunan, diantaranya Sondang P. Siagian (2000: 4), yang menyatakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa. Mengetahui sejarah adalah penting supaya kita tidak dapat mengulangi kesalahan-kesalahan dari bangsa lain dalam melakukan pembangunan dan memeliharanya. Selain itu, pembangunan harus adil yaitu bagi manusia dan adil juga bagi alam, yang kelestariannya harus dipelihara. Disamping itu, keadaan manusia dan alamnya harus lebih baik karena arti pembangunan adalah menjadi lebih baik yang berkelanjutan (Afiffuddin, 2010: 42-49).

Pembangunan menurut Siagian (2000:15) adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Pendapat lain dikemukakan oleh Todaro (2000:20) bahwa “Pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga

akselerasi pertumbuhan ekonomi, berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Sedangkan (Remiswal, 2013) berpendapat bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.

Pembahasan

Pandangan pembangunan menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto (1993: 8), menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi lain, yang dipandang lebih baik. Pembangunan itu sendiri dapat pengurangan kesenjangan pemberantasan kemiskinan absolute dan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu skema baru otonomi daerah yang di dalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005; 123). Menurut Davis dan Newstorm dalam (Remiswal, 2013) bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Pembangunan dapat diartikan oleh masing-masing pakar berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada intinya pembangunan merupakan proses

menuju pada perubahan. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa.

Dalam konteksnya yang luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah: Pembangunan adalah perubahan-perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang.

Pembangunan adalah pertumbuhan Pertumbuhan maksudnya, kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga cakupannya adalah seluruh segi kehidupan. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan sehingga dibutuhkan suatu rangkaian usaha secara sadar dilakukan. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apa pun kegiatannya, tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan kecil atau besar. Negara merupakan organisasi sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau atau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau

bangsa.

Ideologi apapun yang dianut oleh suatu negara bangsa, struktur politik apapun yang terdapat di masyarakat, sistem perekonomian yang bagaimanapun yang berlaku, dan tata nilai sosial budaya bagaimanapun yang menjiwai kehidupan masyarakat, tetaplah hal-hal yang ingin dicapai atau merupakan cita-cita akhir dari perjuangan suatu negara atau bangsa yaitu meliputi: 1). Keadilan sosial, kemakmuran yang merata, 2). Perlakuan sama dimata hukum, 3). Kesejahteraan material, mental, dan spiritual, 4). Kebahagiaan untuk semua, harapan. Oleh karena itu, para pemimpin terlebih khusus dalam hal ini pemerintah desa dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan dengan matang yaitu dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan top down dan bottom-up. Pendekatan pembangunan top down (dari atas ke bawah) masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang bersifat vital atau terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, sedangkan pendekatan bottom-up. Perencanaan semacam ini membuat masyarakat langsung yang menentukan apa yang direncanakan, dengan cara apa akan dilakukan dan yang paling menjadi dasarnya adalah perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri sehingga kegunaan dari pembangunan yang akan dilaksanakan akan sangat berarti dan berguna bagi kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan. Agar jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan, tambatan perahu. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu : irigasi pedesaan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi pedesaan. Ketenteraman dan keamanan.

Dengan demikian, suatu perencanaan sangatlah penting dalam pembangunan karena tanpa adanya perencanaan yang matang maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik atau apa yang menjadi harapan bersama tidak dapat terselenggara sesuai peran pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Pemerintahan desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, maka pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi maka pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian

an perselisihan, dan lain sebagainya.

Untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa (Nurgiansah, 2020).

Untuk mengetahui peranan pemerintah desa, dapat dilihat dari:

1. Perencanaan, Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa yang hendak di bangun di desa. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa dapat melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat.
2. Pelaksanaan, Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, Karena, pemerintah dikatakan berhasil dalam merencanakan jika hasil yang dicapai sangat bagus dan selesai dikerjakan.
3. Pengawasan, Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari penyelewengan anggaran kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilain hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan.

Peranan Pemerintah desa yang diatur dalam pedoman pelaksanaan PPIP

(program pembangunan infrastruktur pedesaan), diantaranya:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP diwilayah kerjanya;
2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisasi dan pembentukan OMS, KPP dan KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya;
3. Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan perempuan/minoritas dan orang miskin dalam setiap tahapan kegiatan;
4. Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan;
5. Memfasilitasi terbentuknya OMS, KPP dan KD yang dilakukan melalui forum musyawarah tingkat desa;
6. Membantu kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja Masyarakat;
7. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
8. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
9. Menjamin dan memfasilitasi transparansi pelaksanaan kegiatan;
10. Menyiapkan Posko OMS yang digunakan sebagai sekretaris program desa;
11. Turut menandatangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua OMS;
12. Memfasilitasi KPP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun;
13. Menerima infrastruktur terbangun dari Pemerintah Kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP;
14. Mendukung pelaksanaan PPIP melalui sinkronisasi program dan channeling ke stakeholderlainnya;
15. Membina OMS agar berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya;

16. Menandatangani serta mentaati Pakta Integritas bersama wakil rakyat.

Pada jurnal yang ditulis oleh Rabia Gani dkk. Terdapat tiga peran pemerintah desa:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator, Peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode/program, sistim ataupun cara berpikir.
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator, Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator, Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desabergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur adalah:

1. Terbatasnya Sarana Komunikasi. Dapat dikarenakan oleh terbatasnya signal

sehingga sult untuk menghubungi pihak-phak yang terlibat.

2. Sumber Daya Manusia. Di era global ini dibutuhkan kecerdasan dalam IPTEK tetapi masih banyak orang yang belum menguasainya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa Pmerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pemerintahan desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan top down dan bottom-up. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu kaur pemerintahan, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang disebut perangkat desa. Dibentuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan Lembaga perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat desa. Disamping itu, juga pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, Hendak nya seorang kepala desa harus bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya, disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu

menyelenggarakan program di bidang kemasyarakatan, membina ketenteraman, dan keterlibatan masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa

semangat gotong royong masyarakat selain itu juga harus melaksanakan 3 perannya yaitu melaksanakan nya sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif, dkk. 2020. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Akib, Karmil, dkk. 2017. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 8 No 1.
- C. Allokendek, dkk. Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. *Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol-Unsrat*.
- Gani, Rabia. dkk. 2016. Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 5 No 1.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Rabia Gani, dkk. Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Wahyudi Dahlan. 2012. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No 2.
- Wahyudi. Indrasto, dkk. 2014. Peranan Pemerintahan desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infragstruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambai Kabupaten Mamasa.
- Yoga Hariyanto, S. F. 2021. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*